



Pengaruh Implementasi E-Government Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Instansi Pemerintah

Endang Ranitawati¹, Anton Eko Yulianto², Yahya³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA)

endangranitawati@stiesia.ac.id¹, antonekoyulianto@stiesia.ac.id², yahya@stiesia.ac.id³

Abstract

Digital transformation through the implementation of E-Government is one of the strategies of regional governments in improving the quality of governance, especially in realizing transparency and accountability of regional finances. The purpose of this study is to analyze the impact of e-Government implementation on regional financial transparency and accountability in the Semarang City Government. This study uses a quantitative approach with a survey method. The sampling technique used purposive sampling with a sample of 120 respondents from ASN employees involved in financial management and implementation of electronic-based government systems at the Semarang City Government OPD. The research results show that e-government implementation has a positive and significant impact on regional financial transparency. E-government implementation also has a positive and significant impact on regional financial accountability. This finding strengthens the concept of good governance and stewardship theory, which positions digital technology as a strategic system in improving information transparency, the quality of public accountability, and the effectiveness of regional financial governance. The implications of this research indicate the need to strengthen the integration of information systems, improve human resource competencies, and optimize the use of SPBE to support more transparent and accountable regional financial management.

Keyword: E-Government, Transparency, Financial Accountability

Abstrak

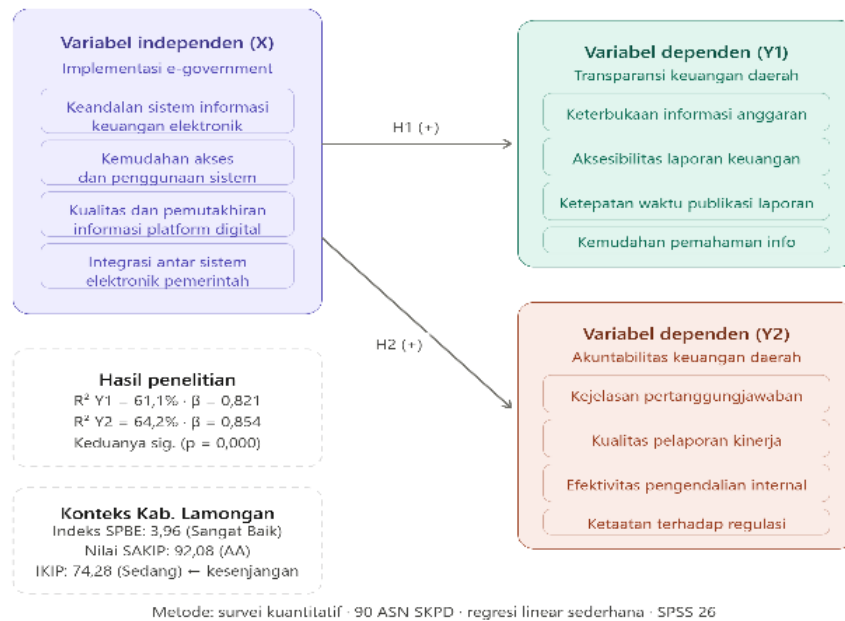
Transformasi digital melalui implementasi *E-Government* menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh implementasi *E-Government* terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berjumlah sampel 120 responden dari karyawan ASN yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD Pemerintah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *E-Government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Implementasi *E-Government* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini memperkuat konsep good governance dan stewardship theory yang menempatkan teknologi digital sebagai sistem strategi dalam meningkatkan keterbukaan informasi, kualitas pertanggungjawaban publik, serta efektivitas tata kelola keuangan daerah. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi sistem informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi pemanfaatan SPBE untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: E-Government, Transparansi, Akuntabilitas Keuangan

1. Pendahuluan

Keberhasilan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) penempatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai indikator utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Sejalan dengan maraknya kasus penyalahgunaan keuangan daerah yang kerap muncul akibat lemahnya pengawasan publik, berdampak pada tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi anggaran semakin meningkat. Dampak peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah benar-benar terimplementasi pada sistem pemerintahan elektronik (*e-governance*), sebagai salah satu daerah otonom yang terus mendorong digitalisasi layanan publik Pemerintah Kota Semarang dihadapkan pada tantangan untuk memastikan implementasi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan karena implementasi *E-Government* telah menjadi salah satu instrumen utama reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien, tetapi juga harus menjamin keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan teknologi informasi melalui *E-Government* diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pengaruh Implementasi E-Government Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Instansi Pemerintah



Gambar 1 Kerangka konseptual

Andrianto, 2007 dalam bukunya memberikan pengertian tentang *E-government* merupakan pemberian layanan dan informasi kepada masyarakat secara transparansi dan akuntabel oleh penyelenggara negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerapan sistem informasi *e-governance*, pernyataan tersebut ditunjukkan dari berbagai penelitian terdahulu. Studi pada Pemerintah Kota Bandung membuktikan bahwa penerapan sistem informasi e-government mampu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal mampu dikurangi dengan penerapan sistem informasi e-governance, hal ini dibuktikan pada Pemerintah Kota Bandung (Nurindahsari dan Trisyanto, 2022), asimetri informasi antara agen dan prinsipal dapat ditekan dengan keberadaan sistem informasi yang baik pernyataan sejalan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Demikian pula studi kasus pada beberapa instansi pemerintah di Indonesia menemukan bahwa implementasi *e-government* secara signifikan meningkatkan transparansi melalui akses informasi publik yang lebih terbuka, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui sistem monitoring dan pelaporan yang lebih efektif (Musri, et al, 2024).

Pola yang sama muncul juga dalam dimensi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD secara umum. Penelitian pada SKPD Kabupaten Buleleng menemukan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD, tetapi partisipasi publik tidak berpengaruh signifikan (Swandewi dan Dewi, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen digital semata belum tentu menjamin keterlibatan dan pengawasan masyarakat yang efektif. Penelitian mengenai pengaruh *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menemukan bahwa efektivitas instrumen tersebut sangat bergantung pada kesiapan tata kelola dan sumber daya manusia di tingkat implementasi (Aprilliani, 2023). Sementara itu, kajian mengenai transparansi penyajian informasi keuangan dan non-keuangan berbasis *e-government* membuat poin yang lebih tajam: yang menentukan keberhasilan transparansi adalah kualitas dan pemutakhiran konten pada platform digital bukan sekadar ketersediaan sistemnya (Purwanurhadi dan Akbar, 2023).

Pemilihan Pemerintah Kota Semarang sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang cukup baik. Berbagai inovasi digital telah diterapkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan penyediaan informasi publik. Namun demikian, tingginya tingkat digitalisasi pemerintahan belum secara otomatis menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana implementasi *E-Government* benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah kota Semarang sendiri cukup menarik untuk dicermati terkait dengan telah jelas berinvestasi dalam SPBE, Penempatan Indeks SPBE dalam kelompok indikator strategis tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah. Digitalisasi pemerintahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana modernisasi administrasi, melainkan sebagai instrumen strategis yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas, pengendalian

internal, transparansi, serta kinerja organisasi pemerintah daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Semarang menempatkan keberhasilan implementasi SPBE pada level kepentingan yang setara dengan kualitas laporan keuangan yang tercermin dalam opini BPK, kualitas akuntabilitas kinerja yang tercermin dalam nilai SAKIP, serta efektivitas pengendalian internal yang tercermin dalam maturitas

Kebijakan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena implementasi SPBE pada dasarnya membutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan aplikasi pemerintahan, integrasi data, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPBE seharusnya tidak hanya tercermin dari peningkatan nilai indeks semata, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini juga penting dilakukan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara implementasi *E-Government*, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat pertanggungjawaban keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance.

Sudah sangat tingginya skor tata kelola internal (Indeks SPBE dan nilai SAKIP) : kesenjangan yang patut diperhatikan, namun publik (IKIP) merasakan masih di level menengah. Menurut Wijaya (2024) dalam Saputri et al (2024) dalam Purwanurhadi dan Akbar (2023), menyatakan bahwa bentuk-bentuk temuan-temuan sebelumnya yang selaras, membuktikan bahwa sistem *e-government* dan indeks tata kelola yang meningkat tidak otomatis berarti masyarakat merasa lebih terinformasi, kecuali kontennya memang mudah diakses, terkini, dan terkelola dengan baik. Sejauh penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara khusus menguji pengaruh implementasi *e-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang — dan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini, dengan harapan dapat menyumbang pada literatur akuntansi sektor publik sekaligus memberi arah praktis bagi optimalisasi tata kelola keuangan daerah berbasis digital di Kotamadya Semarang.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik (*steward*) memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan masyarakat sebagai pemilik sumber daya (*principal*). Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Implementasi *E-Government* dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, mempercepat penyampaian laporan, serta memperkuat mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan *E-Government* dapat mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *stewardship* melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Teori Good Governance

Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Implementasi *E-Government* dipandang sebagai instrumen yang mampu memperkuat prinsip-prinsip *good governance* melalui digitalisasi proses administrasi, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Implementasi E-Government

Implementasi *E-Government* mengacu pada tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung proses administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam lingkungan pemerintah daerah, implementasi *E-Government* diwujudkan melalui berbagai sistem elektronik seperti *e-budgeting*, *e-planning*, *e-procurement*, *e-reporting*, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator Implementasi *E-Government* : Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, Kualitas sistem informasi, integrasi sistem dan data, kemudahan penggunaan sistem, keamanan informasi, kecepatan akses informasi.

Transparansi Keuangan Daerah

Transparansi keuangan daerah merupakan keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era digital, transparansi keuangan tidak hanya diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan, tetapi juga melalui penyediaan data anggaran, realisasi anggaran, dan informasi keuangan lainnya secara elektronik. *E-Government* memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran.

Indikator transparansi keuangan daerah : Keterbukaan informasi keuangan, kemudahan akses informasi, kelengkapan informasi yang disajikan, ketepatan waktu penyampaian informasi, kemudahan pemahaman informasi.

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan anggaran kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi *E-Government* dapat memperkuat akuntabilitas melalui peningkatan kualitas informasi keuangan, pengendalian internal yang lebih baik, serta tersedianya mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang lebih efektif.

Indikator akuntabilitas keuangan daerah : Pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Kepatuhan terhadap, kepatuhan peraturan perundang-undangan, Keandalan laporan keuangan, Efektivitas pengendalian internal, Evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan.

Hubungan Implementasi E-Government dengan Transparansi Keuangan Daerah

Implementasi *E-Government* memungkinkan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem elektronik yang terintegrasi dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Oleh karena itu, semakin baik implementasi *E-Government* maka semakin tinggi tingkat transparansi keuangan daerah.

Hubungan Implementasi E-Government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Implementasi *E-Government* dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui penyediaan sistem informasi yang mampu mendukung pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, monitoring anggaran, dan pengendalian internal secara lebih efektif. Sistem elektronik yang terintegrasi juga dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan demikian, implementasi *E-Government* diperkirakan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Implementasi E-Government dengan Transparansi Keuangan Daerah

Implementasi *E-Government* memungkinkan informasi keuangan daerah tersedia secara terbuka, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis:

H1: Implementasi *E-Government* berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang.

Pengaruh Implementasi E-Government dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Implementasi *E-Government* mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis:

H2: Implementasi *E-Government* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang bertujuan menguji hubungan dan pengaruh implementasi *E-Government* terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada pemerintah kota Semarang. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja pada OPD Pemerintah Kota Semarang dan memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1). Pegawai yang bekerja pada bagian keuangan atau perencanaan; (2). Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun; (3). Terlibat dalam penggunaan sistem *E-Government* keuangan daerah. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumusan *Slovin* atau mengikuti ketentuan minimum analisis SEM, yaitu 5-10 kali jumlah indikator penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner dengan skala likert 1 – 5. Sedangkan uji penelitian menggunakan uji instrumen penelitian yang terdiri dari : uji validitas dan uji reliabilitas, untuk teknik analisis data terdiri dari : uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Uji Validitas

Butir-butir pertanyaan dari masing-masing indikator variabel X1, Y2 dan Y1 yang diajukan dalam bentuk kuesioner menyatakan **valid** dengan nilai r hitung $> r$ tabel (0,179).

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian *reliabilitas*, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian mengenai pengaruh implementasi *E-Government* terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang.

Tabel 1 Uji Reliabilitas

Reliability Statistic

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Implementasi E-Government	6	0,867	Reliabel
Transparansi Keuangan Daerah	5	0,851	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan Daerah	5	0,882	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah 2026

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandarized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.327800
		96
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.085
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.682
Asymp. Sig. (2-tailed)		.797 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,763. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,763 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Uji Multikolinearitas Model 1

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	1,000	1,000

Dependen Variabel Transparansi Keuangan Daerah

Tabel 4 Uji Multikolinearitas Modal 2

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	1,000	1,000

Dependen Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Tolerance sebesar 1,000 dan nilai VIF sebesar 1,000. Nilai tersebut memenuhi kriteria pengujian, yaitu nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

c). Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas Model 1

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig.
Konstanta	2,543	2,876	0,005
Implementasi E-Government (X)	0,072	0,814	0,417

Dependen Variabel Transparansi Keuangan Daerah

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas Modal 2

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig.
Konstanta	2,318	2,564	0,012
Implementasi E-Government (X)	0,058	0,693	0,49

Dependen Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua model dengan satu variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi *E-Government* terhadap Transparansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Semarang.

Model 1 Pengaruh Implementasi E-Government terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Tabel 7 Analisis Regresi 1

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.
Konstanta	8,215	3,421	0,001
Implementasi E-Government	0,756	9,876	0

Dependen variabel Transparansi Keuangan Daerah

Sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda :

$$Y1 = 8,215 + 0,756 X$$

Model 2 Pengaruh Implementasi E-Government terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Tabel 8 Analisis Regresi 2

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.
Konstanta	7,832	3,116	0,002
Implementasi E-Government	0,812	10,245	0,000

Dependen variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah

Sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda model 2 :

$$Y2 = 7,832 + 0,812 X$$

Uji Hipotesis

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Uji t

Uji hipotesis ini dilakukan menggunakan uji t (persial) dimana tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) yang terdiri dari :

Pengaruh Implementasi *E-Government* terhadap Transparansi Keuangan Daerah

H₀₁ : Implementasi *E-Government* tidak berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan Daerah

H₁ : Implementasi *E-Government* berpengaruh positif terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Tabel 9 Uji t 1

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.
Implementasi E-Government	0,756	9,876	0,000

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 9,876 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($9,876 > 1,980$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Dengan demikian **H₀** ditolak dan **H₁** diterima.

Pengaruh Implementasi *E-Government* terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

H₀₂ : Implementasi *E-Government* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

H₂ : Implementasi *E-Government* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Tabel 10 Uji t 2

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Sig.
Implementasi E-Government	0,812	10,245	0,000

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 10,245 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($10,245 > 1,980$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Dengan demikian **H₀** ditolak dan **H₂** diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi Model 1

Pengaruh Implementasi *E-Government* terhadap Transparansi Keuangan Daerah

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,673	0,453	0,448	2,185

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi *E-Government* mampu menjelaskan variasi Transparansi Keuangan Daerah sebesar 45,3%, sedangkan sisanya sebesar 54,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal, budaya organisasi, partisipasi masyarakat, dan faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi Model 2

Pengaruh Implementasi *E-Government* terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,721	0,520	0,516	2,047

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi *E-Government* mampu menjelaskan variasi Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 52,0%, sedangkan sisanya sebesar 48,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi *E-Government* terhadap Transparansi Keuangan Daerah

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10872>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi *E-Government* yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, maka semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Implementasi *E-Government* memungkinkan informasi mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, realisasi keuangan, serta laporan pertanggungjawaban dapat diakses secara lebih cepat, mudah, dan terbuka oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian Syamsul dan Zuhroh (2021) menemukan bahwa penerapan *E-Government* berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi melalui website pemerintah daerah mampu meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat sehingga mendorong keterbukaan pengelolaan anggaran. Selain transparansi, *E-Government* juga dikaitkan dengan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian Antoni dkk (2022). menunjukkan bahwa *E-Government* berperan sebagai mekanisme yang memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas informasi, pengawasan administrasi, dan pengendalian proses pengelolaan keuangan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menyimpulkan bahwa faktor teknologi menjadi salah satu determinan penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif *Good Governance*, transparansi merupakan salah satu prinsip utama yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya publik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik juga memungkinkan proses penyajian informasi menjadi lebih akurat, real-time, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi pemerintahan bukan hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Implementasi *E-Government* terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas implementasi *E-Government* akan diikuti oleh peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Sistem pemerintahan berbasis elektronik memungkinkan setiap aktivitas pengelolaan keuangan terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses pengendalian, *monitoring*, evaluasi, dan audit.

Terdapat penelitian lain tentang peran pemanfaatan teknologi digital secara konsisten dan partisipasi publik untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait program pemberantasan korupsi (Aprillia et al, 2024), sementara kajian Susniwati (2025) tentang *good governance* di era digital menyimpulkan bahwa implementasi e-government memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka sehingga dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Menurut Hochstetter et al (2023) menyatakan bahwa pada konteks internasional, transparansi sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) juga terbukti menjadi strategi penting untuk menekan praktik korupsi dan mendorong pengelolaan sumber daya fiskal yang lebih berkelanjutan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa investasi pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya menghasilkan efisiensi administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan implementasi *E-Government* perlu terus dilakukan melalui peningkatan integrasi sistem, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan keamanan dan kualitas informasi yang dihasilkan.

Reference

- A. S. Apriliani, N. Dirgantari, E. Hariyanto, dan H. Wibowo, 2023. "Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah," vol. 7, no. 1. doi: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- D. R. Saputri, S. Pujiningsih, dan H. Utami, 2024. "Determinants of Transparency of Local Government Financial Reports in Indonesia," vol. 2024, no. 3, pp. 120–131. doi: [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-3\(105\)-120-131](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-3(105)-120-131)
- J. Hochstetter, F. Vásquez, M. Diéguez, A. Bustamante, dan J. Arango-López, 2023. "Transparency and E-Government in Electronic Public Procurement as Sustainable Development," Sustainability, vol. 15, no. 5, Art. no. 4672. doi: <https://doi.org/10.3390/su15054672>
- J. Purwanurhadi dan F. S. Akbar, 2023. "Analisis Transparansi Penyajian Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Berbasis E-Government," vol. 3, no. 1. doi: <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18089>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, *Keputusan Menteri PANRB No. 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Jakarta: KemenPANRB, 2024.

- K. D. Swandewi dan N. A. W. T. Dewi, 2023. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Publik Terhadap Pengelolaan APBD Pada SKPD Kabupaten Buleleng," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol. 14, no. 4. doi: <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i04.50776>
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- M. C. Jensen dan W. H. Meckling, 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics*, vol. 3, no. 4, hal. 305–360.
- M. Musri, F. R. Pasaribu, N. Khudri, Y. Ariyati, dan Y. Rahman, 2024. "Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Negara," vol. 7, no. 3. doi: <https://doi.org/10.54082/jupin.1495>
- N. Andrianto, *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- R. A. Azzahratullah, A. Azka, dan E. H. Fanida, 2026. "Implementasi E-Budgeting dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya dalam rangka Meningkatkan Transparansi Keuangan Daerah," *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, vol. 4, no. 1. [Online]. Available: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/antasena/article/view/503>. Accessed: Jun. 12, 2026.
- R. Nurindahsari dan R. Trisyanto, 2022. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi E-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)," *Indonesian Accounting Research Journal*, vol. 2, no. 3. doi: <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4128>
- R. Rodhiyah dan P. F. Kusuma, 2025. "Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah: Tinjauan Literatur Sistematis dan Meta Analisis Sederhana," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, vol. 3, no. 4. doi: <https://doi.org/10.55606/jumia.v3i4.4294>
- S. Susniwati, A. Ardiyansah, dan D. Sukorina, 2025. "Good Governance di Era Digital: Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia," vol. 8, no. 1. doi: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.277>
- Syamsul, & Siti Zuhroh. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: DAMPAKNYA PADA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 1–10.
- S. Wijaya, Alfitri, M. H. Thamrin, dan D. H. Salya, 2024. "The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services," *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, vol. 6, no. 2. doi: <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1157>
- W. Aprilla, M. Wulandari, dan A. Elcaputera, 2024. "Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 2, no. 4, 2024. doi: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>